BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, MEREK, DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

A. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran *legisme*. Aliran *legisme* muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya *Code Civil* Prancis yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampungseluruh masalah hukum. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran *legisme*, hakim hanyalah merupakan “corong undang-undang”, di mana ia hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan

instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. (Nur, 2023)

B. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Semakin berkembangnya kreatifitas seseorang semakin juga berkembangnya peradaban manusia. Istilah pada Hak Milik Intelektual berasal dari kata “*Intellectuele Eigendomsrecht*” dalam sistem eropa Kontinental. Pada istilah Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dipergunakan terutama oleh banyaknya pencipta. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari garis besar haluan Negara Tahun 1999-2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rihgt* dengan Hak Internasional, yakni dengan disahkannya Paris Convention yang mengatur pada perlindungan terhadap Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang dalam pengertiannya luas termasuk Paten, Merek, Desain Industri, Nama Dagang, Indikasi Geogrifi serta pencegahan persaingan yang curang. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1886 disusul dengan perlindungan Hak Cipta, yakni dengan di sahkannya *Berne Convetion for the Protection of Literary and Artistic Works*. Yang di dalamnya menyangkut pada karya-karya sinematografi, arsitektur, dan karya-karya artistik tertentu (Yanto et al., 2020)

Rachmadi Usman memberikan pengertian HKI sebagai “hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya Djumhana mengemukakan bahwa HKI merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya memiliki kebebasan untuk berbuat apa pun sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Namun dalam perkembangannya kebebasan itu mengalami perubahan atau pembatasan antara lain melalui lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Sri Imaniyati, 2010)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia dan ia berhasil menciptakan suatu kreasi dimana kreasi tersebut menjadi bernilai dan mempunyai manfaat ekonomi. HKI sendiri merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Ada pula yang mengatakan HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi (Sanjaya, 2016).

Indonesia mulai mengenal HKI secara spesifik itu sejak ketentuan TRIPs yang mengatur HKI secara global. Bila mendasar kepada ketentuan

TRIPS, amak HKI itu dapat dikelompokan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri :

1. *Copyrights dan related rights*
2. *Trademark;*
3. *Gergraphical indications;*
4. *Industrial design;*
5. *Patens;*
6. *Layout design of integrated circuits;*
7. *Protection of undisclosed information;*
8. *Control of anti competitive practice in contractual license.*

Hal tersebut mulai diharmonisasikan sejak Indonesai telah menyetujui untuk meratifikasi Uruguay Round, dimana aturan mengenai TRIPs juga harus diberlakukan dinegara anggota GATT. Sebagai Negara berkembang sesungguhnya keberadaan aturan tentang HKI bisa dikatakan memberikan dampak positif bagi perkembangan perdagangan dan perekonomian. Terutama untuk para pelaku ekonomi kreatif, mereka menjadi pihak yang jelas mendapat tempat didalam perlindungan HKI. (Sanjaya, 2016)

Adapun sifat-sifat HKI, yaitu (Sri Imaniyati, 2010):

1. Mempunyai jangka waktu terbatas HKI memiliki jangka waktu yang terbatas, artinya hak yang diberikan kepada pencipta atau inventor tidak tak terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah jangka waktu perlindungan habis, dapat diperpanjang, yaitu hak merek.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa pun. Pemilik hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.
3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan HKI memiliki sifat mutlak yang selama ini hanya diberikan kepada pemilikan benda/ kekayaan. Hal ini dikarenakan HKI merupakan bagian dari hukum harta benda.

Prinsip-prinsip HKI dikemukakan oleh Muhammad Djumhana ialah sebagai berikut (Sri Imaniyati, 2010):

1. Prinsip Keadilan (*principle of natural justice*), yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*), yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.
3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*), yaitu bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan

kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*), yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

C. Merek

Menurut Prof. Molengraaf merek adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. (Sulistiyono, 2021)

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek) meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang- Undang digunakan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut (Sulistiyono, 2021) :

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya.

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun fungsi merek sebagai berikut (Atmoko, 2019) :

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*) fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produksinya sebagai jaminan reputasi hasil usaha ketika di diperdagangkan;
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotions*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik

konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya;

3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*Quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguwungkan produksi pemilik merek saja melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen;
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan pengenalan asal barang atau jasa yang dihubungkan dengan daerah atau negara asalnya.

Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini di atur dan dilindungi oleh Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Seiring perkembangan jaman yang terjadi banyak permasalahan tentang merek yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Singaraja mengenai peniruan, penjiplakan dari suatu merek yang sudah terdaftar. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sangat jelas dilarang meniru merek yang sudah terdaftar pernyataan tersebut terdapat dalam (Wirayuda et al., 2020) Pasal 90 yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 91 berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pasal 92 berbunyi :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) terdapat pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93 berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Dalam perannya pemerintah sebagai mana diamanatkan Pasal 25 UU Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan dengan memberikan atau menerbitkan Sertifikat Merek (Atmoko, 2019) :

1. Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak merek tersebut didaftar.

Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Nama dan alamat pemilik merek yang di daftar;
- b. Nama dan alamat lengkapkuasa dalam hal permohonan melalui kuasa;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan dilakukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapan dalam ejaan latin;
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;

- g. Kelas dan jenis barang dan atau jasa merek yang didaftar;
 - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
2. Dalam hal sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung tanggal penerbitan sertifikat. Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pembahasan mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengenai pengelompokan jenis usaha yang meliputi usaha industri dan usaha perdagangan. Pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak selalu sama, tergantung konsep dari negara tersebut. Mengenai pengertian atau definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ternyata sangat bervariasi, disatu negara dengan negara lainnya. Perbedaan persepsi dan kepentingan antar instansi pada akhirnya banyak menimbulkan kesulitan di lapangan. Bukan hanya di tingkat kebijakan maupun implementasinya yang rancu, Bahkan sejak definisi pun sebenarnya sudah bermasalah, berbagai kementerian dan instansi yang ada mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berbeda. (Siti Rodiah, 2017).

UMKM mempunyai peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara- negara sedang berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga negara- negara maju, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Di Indonesia, seperti halnya yang disampaikan oleh Tulus T. H Tambunan menyampaikan bahwa sudah sering

dinyatakan di dalam banyak seminar dan lokakarya, dan juga banyak dibahas di media-media masa, bahwa UMKM di Indonesia sangat penting, terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Fakta menunjukkan bahwa, kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak, dibandingkan dengan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Oleh karena itu UMKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan secara optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat terus setiap tahunnya. Dengan menyerap banyaknya tenaga kerja, berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah selama ini memerangi kemiskinan di dalam negeri. (Dr. Siti Rodiah, S.H., 2017)

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Undang-Undang tersebut, selain kriteria yang digunakan seperti diuraikan diatas untuk mendefinisikan UMKM diatur juga dalam Pasal 6 mengenai kekayaan UMKM :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan Rp. 500.000.000,00 (lima bersih ratus lebih dari juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Dr. Siti Rodiah, S.H., 2017)

Bentuk dan Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha Kecil dapat digolongkan menurut bentuk, jenis dan kegiatan yang dilakukannya. Menurut Pasal 13 Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 serta penjelasannya Jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan serta Penjelasannya, dan di dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 Tentang pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil, serta pada Lampiran Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dengan Syarat Kemitraan, bahwa bentuk dan jenis Usaha kecil dapat dilihat dari beberapa segi antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha Kecil Ditinjau dari Hakekat dan Penggolongannya. Ditinjau dari hakikat dan penggolongannya, usaha kecil dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
 1. Industri Kecil, misalnya industri kerajinan rakyat, industri cor logam, konveksi, dan berbagai industri kecil lainnya.
 2. Perusahaan berskala kecil, misalnya toko kerajinan, penyalur, koperasi, toserba, jasa profesi, toko bunga, dan lain sebagainya.
 3. Sektor informal, misalnya agen barang bekas, warung, kios kaki lima, dan lain sebagainya.
- b. Usaha Kecil Ditinjau dari Bentuk Usahnya. Berdasarkan bentuk usahanya, perusahaan yang terdapat di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu :
 1. Usaha Kecil Berbentuk Usaha Perseorangan. Usaha perseorangan bertanggungjawab kepada pihak ketiga atau pihak lain (dalam hal ini konsumen) dengan dukungan harta kekayaan perusahaan yang merupakan milik pribadi pengusaha yang bersangkutan. Jumlah usaha perseorangan di Indonesia cukup banyak dan skala usahanya relatif kecil. Pada umumnya bentuk usaha perseorangan ini lebih mudah didirikan, karena tidak memerlukan persyaratan dan prosedur yang rumit dan bertahap seperti bentuk-bentuk lainnya.
 2. Usaha Kecil Berbentuk Usaha Persekutuan (partnership). Usaha persekutuan berusaha untuk mencapai tujuan- tujuan perusahaan

dalam memperoleh laba. Usaha persekutuan merupakan bentuk kerjasama dari beberapa orang yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap kewajiban-kewajiban usaha persekutuannya. Bentuk pertanggungjawaban dan pola kepemimpinannya berbeda-beda tergantung bentuk-bentuk persekutuan yang didirikan.

3. Usaha Kecil Ditinjau dari Jenis Produk atau Jasa yang Dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan. Ditinjau baik dari jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan, usaha kecil dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Produk/Jasa Usaha Kecil Melalui Usaha Perdagangan, meliputi :
 - a. Keagenan, misalnya minyak, Koran/ majalah, sepatu, pakaian, dan lain-lain.
 - b. Pengecer, misalnya beras, kebutuhan sehari-hari, buah-buahan dan lain-lain.
 - c. ekspor/impor, bisa berujud produk lokal maupun internasional;
 - d. sektor informal, misalnya pengumpulan barang bekas, kaki lima, dan lain-lain.
2. Produk/Jasa usaha Kecil Melalui Usaha Pertanian, meliputi :
 - a. Pertanian pangan maupun perkebunan, misalnya bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan, dan lain-lain;

- b. Perikanan darat/laut, misalnya tambak udang, pembuatan kerupuk ikan, dan produk lain dari hasil perikanan darat dan laut;
 - c. Peternakan dan usaha lainnya yang termasuk lingkup pengawasan Departemen Pertanian, misalnya produsen telur ayam, susu sapi, produksi hasil peternakan, dan lain-lain.
3. Produk/Jasa Usaha Kecil Melalui Usaha Industri, meliputi :
- a. industri logam, misalnya perajin logam, perajin kulit, keramik, fiberglass, marmer, dan lain-lain;
 - b. makanan/minuman, misalnya produsen makanan tradisional, makanan ringan, catering, dan produk lainnya;
 - c. pertambangan, misalnya bahan galian, aneka industri kecil, pengrajin perhiasan, batu-batuan, dan lain-lain;
 - d. konveksi, misalnya produsen garment, batik, tenun ikat, dan lain-lain.
4. Usaha Kecil Melalui Usaha Jasa, meliputi :
- a. konsultan, misalnya konsultan hukum pajak, manajemen, dan lain-lain;
 - b. perencanaan, misalnya perencanaan teknis, perencanaan system, dan lain-lain;

- c. perbengkelan, misalnya bengkel mobil, elektronik, jam, dan lain-lain;
- d. transportasi, misalnya travel, taxi, angkutan umum, dan lain-lain;
- e. restoran, misalnya rumah makan, coffe-shop, cafeteria, dan lain-lain;
- f. konstruksi, misalnya, kontraktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan. (Dr. Siti Rodiah, S.H., 2017)